PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Alun Alun Utara Nomor 07 Telp. (0334) 881146 – 881255 Fax. 881146
LUMAJANG – 67316

PENGUMUMAN
Nomor : 800.1.2.2/1760/427.72/2024

TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
FORMASI TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, dibuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 107 formasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan CPNS Tenaga Kesehatan sejumlah 42 formasi
2. Pengadaan CPNS Tenaga Teknis sejumlah 65 formasi

Kebutuhan Pengadaan CPNS, terdiri dari :

1. Kebutuhan CPNS Umum diperuntukan seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan;
2. Kebutuhan CPNS Khusus diperuntukan bagi :
   a. Penyandang Disabilitas
   b. Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat “Dengan Pujian/*Cumlaude*”

Rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penentuan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Edaran Nomor PT.01.03/F/570/2024 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

II. PERSYARATAN PELAMARAN CPNS

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

10. Dalam hal pelamar berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK (Bupati);
11. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN (CPNS atau PPPK);
12. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
13. Pelamar yang diketahui melamar pada lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pengadaan;
15. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalan proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
16. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada unit penempatan di Pemerintah Kabupaten Lumajang dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
17. Ketentuan mengenai Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024;
18. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Bupati Lumajang, namun tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
19. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:
    a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
    b. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
    c. Akreditasi sebagaimana dimaksud huruf a. tercantum dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;

d. Pada kebutuhan umum, akreditasi Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi dan Sekolah Menengah Atas sederajat **minimal B** (**Baik Sekali**).

20. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan merujuk pada Surat Edaran Nomor PT.01.03/F/570/2024 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 atau menyesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam aplikasi SSCASN;
21. Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dilamar, dengan ketentuan :
    a. STR diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
    b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
    c. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024.
22. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk formasi umum dan formasi disabilitas dengan persyaratan nilai **minimal 3,00** pada skala 0 s.d. 4,00 dibuktikan dengan IPK yang tercantum pada transkrip nilai. Bagi lulusan SMA sederajat persyaratan nilai rata-rata kelulusan **minimal 80,00**;
23. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa melamar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya;
24. Ketentuan pelamar disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus:
    a. Wajib melampirkan Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan format surat keterangan disabilitas (*format terlampir*);
    b. Wajib menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar;
    c. Wajib berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Daerah terkait seleksi administrasi;
    d. Dalam hal pelamar disabilitas melamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra/putri terbaik berpredikat dengan pujian/*cumlaude* maka harus sesuai dengan formasi yang tersedia dan kualifikasi pendidikan serta wajib melampirkan surat keterangan sesuai dengan poin a.

25. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus disabilitas atau kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* sesuai persyaratan pada masing-masing kebutuhan;
26. Formasi khusus disabilitas pada pengadaan PNS tahun 2024 terdiri dari:

NO	JABATAN	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah – Ahli Pertama	Inspektorat Daerah	1
2	Pengendali Dampak Lingkungan – Ahli Pertama	Dinas Lingkungan Hidup	1

27. Bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
    a. Mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), **tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);**
    b. Formasi kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri pada pengadaan PNS tahun 2024 terdiri dari:

NO	JABATAN	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Analis Pasar Hasil Pertanian – Ahli Pertama	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1
2	Pengendali Dampak Lingkungan – Ahli Pertama	Dinas Lingkungan Hidup	1

    c. Perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/*cumlaude* dan berasal dari **perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul** pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
    d. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/*cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

A. SEMUA PENDAFTARAN DILAKSANAKAN MELALUI SSCASN DAN TIDAK ADA PENGIRIMAN BERKAS FISIK KEPADA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CPNS FORMASI TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG;
B. Pelamaran dilakukan melalui laman resmi BKN yaitu https://sscasn.bkn.go.id tata cara sebagai berikut :

I. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti dengan tata cara proses pendaftaran seleksi pengadaan;
II. Selanjutnya pelamar dapat melakukan registrasi pembuatan akun kemudian login dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
III. Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
IV. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
V. Pelamar mengunggah persyaratan pendaftaran berupa scan dokumen asli **(bukan dokumen *fotocopy*)** dan berwarna sebagai berikut :
    1) Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Lumajang, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (*format terlampir*);
    2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan asli yang ditandatangi dan distempel basah (untuk surat keterangan yang sudah bertanda tangan elektronik tidak memerlukan stempel) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    3) Pas foto terbaru berlatar belakang merah polos ukuran 4x6 (memakai kemeja, **bagi yang berhijab memakai kerudung hitam**, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan/hasil rekayasa/foto dipercantik) mengingat saat registrasi pada pelaksanaan ujian jika tidak terbaca pada *face recognition*/pemindah wajah akan menyebabkan kendala tidak dapat mengikuti ujian;
    4) Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang S-1, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
        a. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
        b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S.1 Kedokteran, Profesi dan Spesialis.
        c. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, harus melampirkan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan perubahan tersebut.
    5) Transkrip nilai asli (bukan Transkrip Nilai Sementara) dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
        a. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi melampirkan transkrip nilai S.1 dan profesi;

b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan transkrip nilai S.1 Kedokteran, Profesi dan Spesialis.

6) Surat Pernyataan 5 poin, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (*format terlampir*);
7) Surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun terhitung mulai PNS, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (*format terlampir*);
8) Bukti akreditasi :
   a. Bagi kebutuhan umum dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi berupa *screenshot* akreditasi dari laman BAN-PT dan/atau scan asli/*fotocopy* sertifikat atau Surat Keputusan **pada saat kelulusan**;
   b. Bagi kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* wajib melampirkan bukti akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi berupa *screenshot* akreditasi dari laman BAN-PT dan/atau scan asli/*fotocopy* sertifikat atau Surat Keputusan **pada saat kelulusan**;
   c. Bagi Perguruan Tinggi dengan dokumen akreditasi perguruan tinggi atau program studi/jurusannya berupa Surat Keputusan, cukup melampirkan halaman depan, halaman yang ada akreditasi program studi/jurusan sesuai ijazah pelamar, halaman tanda tangan penetapan Surat Keputusan.
9) Sertifikat atau bukti lain yang menerangkan sebagai *cumlaude*/lulusan terbaik (khusus bagi pelamar CPNS kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/ *cumlaude;*
10) STR (khusus bagi pelamar untuk jabatan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024);
11) Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) ditambah dengan:
   a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
   b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas;

12) Semua tahapan pendaftaran disesuaikan dengan SSCASN dan pelamar wajib mengikuti perkembangan pada laman pendaftaran https://sscasn.bkn.go.id

Catatan :

- Ukuran, bentuk dan isi file yang diunggah menyesuaikan keterangan menu unggahan pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
- Surat Lamaran, Surat Pernyataan 5 Poin, Surat Pernyataan 10 Tahun Mengabdi, dan Surat Keterangan Disabilitas harus disesuaikan dengan format yang telah ditentukan dan dapat diunduh pada lampiran pengumuman ini;
- Dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan **GUGUR** seleksi administrasi;
- Data identitas diri, seperti nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip nilai dan dokumen lainnya.

IV. JADWAL SELEKSI

Berdasarkan surat Plt. Kepala BKN Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, ditetapkan jadwal seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
16	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
17	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
18	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
19	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
20	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
21	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
22	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
23	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
24	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
25	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
26	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
27	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
28	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

**Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan SSCASN*

V. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan CPNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Seleksi Administrasi

   Seleksi administrasi berdasarkan dokumen pelamar yang telah diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi:
   a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
   b. Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
   c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
3. Nilai Ambang Batas (NAB) SKD sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Kategori Pelamar	TWK	TIU	TKP	Nilai Kumulatif	Jumlah Soal	Durasi
Umum	65	80	166	Min. 311	Jumlah 110 soal, terdiri dari: TWK : 30 soal TIU : 35 Soal TKP : 45 Soal	100 menit Penyandang Disabilitas Sensorik Netra 130 menit
Cumlaude	-	85	-	Min. 311		
Disabilitas	-	60	-	Min. 286		

4. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
   Bagi pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diumumkan pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkd.lumajangkab.go.id

VI. MASA SANGGAH

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Penjelasan tentang masa sanggah sebagai berikut:

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekurang-lengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

VII. *HELP DESK*

1. Help desk adalah layanan yang memberikan penjelasan dan informasi terkait permasalahan seleksi pengadaan ASN;
2. *Help desk* Seleksi Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lumajang pada menu Tanya Jawab laman https://bkd.lumajangkab.go.id;
3. Layanan informasi permasalahan pendaftaran di SSCASN dapat disampaikan melalui help desk laman https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pelamar dalam mengikuti Seleksi Pengadaan ASN Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lumajang **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**
2. Pelamar tidak disarankan menerima tawaran dari pihak manapun/yang mengatasnamakan panitia untuk mempermudah diterima sebagai ASN;
3. Penjelasan kualifikasi pendidikan pada lampiran pengumuman ini sebagai berikut:
   a. S-1 Hukum/S-1 Ilmu Hukum yang dimaksud adalah Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, bukan merupakan Hukum Syariah/Hukum Islam/Hukum Keluarga;
   b. S-1 Akuntansi/D-IV Akuntansi yang dimaksud adalah Akuntansi Sektor Publik (bukan perbankan dan/atau syariah);
   c. S-1 Akuntansi Keuangan/D-IV Akuntansi Keuangan/S-1 Akuntansi Ekonomi yang dimaksud adalah bukan akuntansi perbankan dan/atau syariah;
   d. D-III Akuntansi Keuangan bukan akuntansi perbankan dan/atau syariah;
   e. S-1 Administrasi Publik sama dengan S-1 Administrasi Negara sama dengan S-1 Administrasi Pemerintahan;
   f. S-1 Administrasi Bisnis sama dengan S-1 Administrasi Niaga;
   g. S-1 Pendidikan Matematika bukan S-1 Matematika;
4. Pelamar yang tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
5. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, tetapi di kemudian hari:
   a. mengundurkan diri;
   b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen;
   c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
   d. dokumen pelamar yang tidak sesuai ketentuan; atau
   e. meninggal dunia,

   maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Lumajang Formasi Tahun 2024 membatalkan kelulusannya dan dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya.
6. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Lumajang Formasi Tahun 2024 tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain yang disebutkan di atas;

7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkd.lumajangkab.go.id, apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang digunakan adalah informasi terakhir;
8. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Lumajang Formasi Tahun 2024 tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses dan memahami informasi pada laman tersebut.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar ASN pada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada tanggal : 19 Agustus 2024
a.n BUPATI LUMAJANG
SEKRETARIS DAERAH
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah
Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR 800.1.2.2/1760/427.72/2024
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG FORMASI TAHUN 2024

TENAGA TEKNIS

NO	UNIT KERJA	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SEKRETARIAT DAERAH, BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK | D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK | D-IV KEUANGAN PUBLIK | D-IV ANALISIS KEUANGAN | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 ILMU INFORMATIKA | S-1 ILMU LINGKUNGAN | S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S-1 KEUANGAN ISLAM | S-1 AKUNTANSI | S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL | S-1 TEKNIK KOMPUTER | S-1 KEWIRAUSAHAAN | S-1 GIZI | S-1 EKONOMI | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN | D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | S-1 SAINS KOMUNIKASI | S-1 LOGISTIK | S-1 FARMASI KLINIS | S-1 FARMASI | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI | S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 PENDIDIKAN BISNIS | S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER | S-1 PENDIDIKAN EKONOMI | S-1 HUKUM | S-1 SOSIOLOGI | S-1 ILMU POLITIK | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA | S-1 HUKUM SYARIAH | S-1 REKAYASA SIPIL | S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI | S-1 STUDI PEMERINTAHAN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNIK FISIKA | D-IV ARSITEKTUR | D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | D-IV TEKNIK SIPIL | D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D-IV TEKNIK MESIN | D-IV TEKNIK ELEKTRO | S-1 PERENCANAAN WILAYAH | D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG | S-1 TEKNIK SIPIL | S-1 TEKNIK PENGAIRAN | S-1 TEKNIK FISIKA | S-1 TEKNIK MESIN | S-1 ARSITEKTUR | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 DESAIN INTERIOR | S-1 TEKNIK ELEKTRO | S-1 PLANOLOGI | S-1 PERENCANAAN KOTA | S-1 TEKNIK SIPIL PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	2
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	UMUM	SLTA/SMA SEDERAJAT	1
4	INSPEKTORAT DAERAH	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN | D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU INFORMATIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 TEKNIK KOMPUTER | S-1 EKONOMI | D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN | S-1 TEKNIK INDUSTRI | S-1 HUKUM | S-1 SOSIOLOGI | S-1 ILMU POLITIK | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 HUKUM SYARIAH | S-1 EKONOMI SYARIAH | S-1 STUDI PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN	5
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN | D-IV HUKUM | D-IV TEKNIK MATERIAL | D-IV TEKNIK GEODESI | D-IV ARSITEKTUR | D-IV ADMINISTRASI PUBLIK | D-IV ILMU INFORMATIKA | D-IV TEKNIK ELEKTRO | S-1 TEKNIK SIPIL | S-1 ARSITEKTUR | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 TEKNIK MATERIAL | S-1 HUKUM | S-1 TEKNIK ELEKTRO | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK | D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK | S-1 MANAJEMEN | S-1 POLITIK ISLAM | S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S-1 ADMINISTRASI PAJAK | S-1 SOSIAL ISLAM | S-1 ILMU POLITIK | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	UMUM	SLTA/SMA SEDERAJAT	7
8	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 AKUNTANSI | S-1 EKONOMI | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU SOSIAL | S-1 TEKNIK | S-1 HUKUM | S-1 ADMINISTRASI | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1

NO	UNIT KERJA	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNIK SIPIL | S-1 TEKNIK SIPIL	1
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV AKUNTANSI | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 EKONOMI | S-1 HUKUM ISLAM | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU SOSIAL | S-1 TEKNIK SIPIL | S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 ARSITEKTUR | S-1 HUKUM | S-1 ADMINISTRASI | S-1 PLANOLOGI	2
11	INSPEKTORAT DAERAH	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 ILMU INFORMATIKA | S-1 TEKNIK KOMPUTER | S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER | S-1 REKAYASA KOMPUTER | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1
12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI | D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN | S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK | S-1 AKUNTANSI | S-1 EKONOMI | S-1 MANAJEMEN | D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S-1 TEKNIK KIMIA | S-1 TEKNIK FISIKA | S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S-1 PSIKOLOGI | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 GEOGRAFI | S-1 TEKNIK ELEKTRO | S-1 PLANOLOGI | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	3
13	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK | D-IV AKUNTANSI | D-IV ADMINISTRASI BISNIS | D-IV ADMINISTRASI PAJAK | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 ILMU INFORMATIKA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN | D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | S-1 TEKNIK SIPIL | S-1 HUKUM | S-1 ILMU POLITIK | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ILMU HUKUM	6
14	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV KEPERAWATAN | S-1 KEDOKTERAN | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KURATOR	UMUM	S-1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM | S-1 SENI PERTUNJUKAN | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 ANTROPOLOGI | S-1 ARKEOLOGI | S-1 ILMU SEJARAH	1
16	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 EKONOMI PERTANIAN | S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN | S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN | S-1 AGRIBISNIS | S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	1
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN | S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN | S-1 TEKNIK GEODESI | S-1 MATEMATIKA | S-1 KEDOKTERAN HEWAN | S-1 EKONOMI | S-1 PETERNAKAN | S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN | S-1 ILMU TANAH | S-1 ILMU SOSIAL | S-1 KIMIA | S-1 TEKNIK KIMIA | S-1 FISIKA | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 TEKNIK INDUSTRI | S-1 HUKUM | S-1 SOSIAL | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 BIOLOGI | S-1 GEOGRAFI | S-1 TEKNIK GEOFISIKA | S-1 ILMU PERIKANAN	3
18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV ADMINISTRASI NEGARA | D-IV ARSITEKTUR | D-IV ADMINISTRASI PUBLIK | D-IV PLANOLOGI | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI | S-1 MANAJEMEN | D-IV JASA KONSTRUKSI | S-1 TEKNIK SIPIL | S-1 DESAIN INTERIOR | S-1 HUKUM | S-1 ADMINISTRASI NIAGA | S-1 SOSIOLOGI | S-1 ADMINISTRASI BISNIS | S-1 TEKNIK PLANOLOGI | S-1 PERENCANAAN KOTA	1
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 ILMU GEOGRAFI | S-1 TEKNIK KIMIA | S-1 TEKNIK SIPIL | S-1 TEKNIK GEOLOGI | S-1 TEKNIK INDUSTRI	1
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM	1
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 ILMU INFORMATIKA | S-1 TEKNIK KOMPUTER | S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER | S-1 REKAYASA KOMPUTER | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1

NO	UNIT KERJA	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
22	INSPEKTORAT DAERAH	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	PENYANDANG DISABILITAS	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN | D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU INFORMATIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 TEKNIK KOMPUTER | S-1 EKONOMI | D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN | S-1 TEKNIK INDUSTRI | S-1 HUKUM | S-1 SOSIOLOGI | S-1 ILMU POLITIK | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 HUKUM SYARIAH | S-1 EKONOMI SYARIAH | S-1 STUDI PEMERINTAHAN | S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN | S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN | S-1 TEKNIK GEODESI | S-1 MATEMATIKA | S-1 KEDOKTERAN HEWAN | S-1 EKONOMI | S-1 PETERNAKAN | S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN | S-1 ILMU TANAH | S-1 ILMU SOSIAL | S-1 KIMIA | S-1 TEKNIK KIMIA | S-1 FISIKA | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 TEKNIK INDUSTRI | S-1 HUKUM | S-1 SOSIAL | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 BIOLOGI | S-1 GEOGRAFI | S-1 TEKNIK GEOFISIKA | S-1 ILMU PERIKANAN	1
24	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	LULUSAN TERBAIK	S-1 EKONOMI PERTANIAN | S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN | S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN | S-1 AGRIBISNIS | S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	1
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	LULUSAN TERBAIK	S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN | S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN | S-1 TEKNIK GEODESI | S-1 MATEMATIKA | S-1 KEDOKTERAN HEWAN | S-1 EKONOMI | S-1 PETERNAKAN | S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN | S-1 ILMU TANAH | S-1 ILMU SOSIAL | S-1 KIMIA | S-1 TEKNIK KIMIA | S-1 FISIKA | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 TEKNIK INDUSTRI | S-1 HUKUM | S-1 SOSIAL | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 BIOLOGI | S-1 GEOGRAFI | S-1 TEKNIK GEOFISIKA | S-1 ILMU PERIKANAN	1
26	DINAS PARIWISATA	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 SISTEM INFORMASI | S-1 ILMU INFORMATIKA | S-1 TEKNIK KOMPUTER | S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER | S-1 REKAYASA KOMPUTER | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1
27	SEKRETARIAT DAERAH, BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	UMUM	D-III KOMUNIKASI MASSA | D-III KEPARIWISATAAN | D-III MANAJEMEN TATA BOGA | D-III TATA BOGA | D-III PARIWISATA | D-III BAHASA INGGRIS | D-III GIZI | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-III PERJALANAN WISATA | D-III TATA HIDANG | D-III PERHOTELAN	1
28	DINAS PERIKANAN	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV PENYULUH PERIKANAN | D-IV PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S-1 ILMU KELAUTAN | S-1 PERIKANAN | S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S-1 ILMU PERIKANAN	1
29	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL | S-1 HUKUM | S-1 PSIKOLOGI | S-1 SOSIOLOGI | S-1 ILMU KOMUNIKASI | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1
30	DINAS PERHUBUNGAN	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	UMUM	SMA IPA | SMK TEKNIK	2
31	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	S-1 AKUNTANSI | S-1 EKONOMI | S-1 HUKUM ISLAM | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU SOSIAL | S-1 ADMINISTRASI	1
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	PERENCANA AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV AKUNTANSI | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 AKUNTANSI | S-1 EKONOMI | S-1 HUKUM ISLAM | S-1 MANAJEMEN | S-1 ILMU SOSIAL | S-1 TEKNIK SIPIL | S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 ARSITEKTUR | S-1 HUKUM | S-1 ADMINISTRASI | S-1 TEKNIK ELEKTRO | S-1 PLANOLOGI	2
33	RSUD DR HARYOTO	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNIK INFORMATIKA | S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | S-1 ILMU KOMPUTER | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 TEKNIK ELEKTRO	1
34	DINAS PERIKANAN	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	UMUM	S-1 PERIKANAN | S-1 BUDIDAYA PERAIRAN | S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S-1 PERIKANAN BUDIDAYA	1
35	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	UMUM	D-III KEPERAWATAN | D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | D-III GIZI | D-III KEBIDANAN | D-III FARMASI	1

NO	UNIT KERJA	JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNIK FISIKA | D-IV ARSITEKTUR | D-IV TEKNIK MESIN | D-IV TEKNIK ELEKTRO | D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG | S-1 TEKNIK SIPIL | S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 TEKNIK FISIKA | S-1 TEKNIK MESIN | S-1 ARSITEKTUR | S-1 DESAIN INTERIOR | S-1 TEKNIK ELEKTRO	1
37	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNIK SIPIL | S-1 TEKNIK SIPIL	1
38	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	UMUM	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN | D-IV ARSITEKTUR | D-IV PLANOLOGI | D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D-IV REKAYASA ELEKTRO | D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI | D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG | D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN RAWA | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA SUMBER DAYA TANAH DAN AIR | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI | D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA | S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK | S-1 ILMU LINGKUNGAN | S-1 PERENCANAAN WILAYAH | S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S-1 TEKNIK ARSITEKTUR | D-IV JASA KONSTRUKSI | D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | S-1 ARSITEKTUR INTERIOR | S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR | S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S-1 TEKNIK SIPIL | S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 TEKNIK PENGAIRAN | S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 ARSITEKTUR | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S-1 TEKNIK PLANOLOGI | S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA | S-1 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S-1 TEKNIK ELEKTRO | S-1 PLANOLOGI | S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN | S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S-1 RANCANG KOTA | S-1 REKAYASA ELEKTRO | S-1 REKAYASA SIPIL | S-1 ARSITEKTUR LANSKAP | S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S-1 PERENCANAAN KOTA | S-1 REKAYASA LINGKUNGAN | S-1 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU | S-1 TEKNIK SISTEM ENERGI | S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA ELEKTRO | S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA ELEKTRONIKA | S-1 REKAYASA SISTEM ENERGI | S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR | S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK | S-1 SAINS LINGKUNGAN | S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S-1 PENDIDIKAN REKAYASA ELEKTRO | S-1 PENDIDIKAN REKAYASA ELEKTRONIKA | S-1 PENGELOLAAN LINGKUNGAN | S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA | S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI	3
				TOTAL	65

TENAGA KESEHATAN

NO	UNIT KERJA	JABATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	BISA DIISI PELAMAR DISABILITAS
1	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
2	PUSKESMAS PASIRIAN	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	TIDAK
3	PUSKESMAS TUNJUNG	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
4	PUSKESMAS TEMPEH	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	TIDAK
5	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	UMUM	1	TIDAK
6	RSUD DR HARYOTO	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	5	TIDAK
7	PUSKESMAS KUNIR	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	TIDAK
8	PUSKESMAS SENDURO	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	TIDAK
9	RSUD PASIRIAN	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
10	PUSKESMAS JATIROTO	BIDAN TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
11	RSUD DR HARYOTO	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	TIDAK
12	PUSKESMAS RANDUAGUNG	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	TIDAK

NO	UNIT KERJA	JABATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	BISA DIISI PELAMAR DISABILITAS
13	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, UPT INSTALASI FARMASI	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
14	RSUD DR HARYOTO	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL	UMUM	1	TIDAK
15	RSUD PASIRIAN	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	UMUM	1	TIDAK
16	RSUD DR HARYOTO	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	UMUM	1	TIDAK
17	PUSKESMAS KLAKAH	NUTRISIONIS TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
18	RSUD DR HARYOTO	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	TIDAK
19	PUSKESMAS SENDURO	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
20	RSUD DR HARYOTO	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	TIDAK
21	RSUD DR HARYOTO	RADIOGRAFER TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
22	PUSKESMAS PADANG	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
23	PUSKESMAS PASIRIAN	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	TIDAK
24	PUSKESMAS LABRUK KIDUL	NUTRISIONIS TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK

NO	UNIT KERJA	JABATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	BISA DIISI PELAMAR DISABILITAS
25	RSUD PASIRIAN	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	UMUM	1	TIDAK
26	PUSKESMAS PASRUJAMBE	NUTRISIONIS TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
27	PUSKESMAS TEMPURSARI	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
28	RSUD DR HARYOTO	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	UMUM	1	TIDAK
29	RSUD PASIRIAN	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	TIDAK
30	RSUD PASIRIAN	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	UMUM	1	TIDAK
31	RSUD PASIRIAN	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	UMUM	1	TIDAK
32	PUSKESMAS KLAKAH	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
33	RSUD DR HARYOTO	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI	UMUM	1	TIDAK
34	RSUD DR HARYOTO	TERAPIS WICARA TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
35	RSUD DR HARYOTO	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	UMUM	1	TIDAK
36	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, UPT LABORATORIUM KESEHATAN	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	TIDAK

NO	UNIT KERJA	JABATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	BISA DIISI PELAMAR DISABILITAS
37	RSUD DR HARYOTO	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONSIA	UMUM	1	TIDAK
38	PUSKESMAS GUCIALIT	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	UMUM	1	TIDAK
			TOTAL	42	

a.n BUPATI LUMAJANG
SEKRETARIS DAERAH
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah
Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004